

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “**Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah)**” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi juga didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan King (dalam Kusumasari, 2014:22). Sedangkan menurut Coppola (dalam Kusumasari, 2014:22) menjelaskan bahwa mitigasi dapat dilihat sebagai upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi risiko bencana.

Untuk itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa peranan BPBD dalam mitigasi bencana Tsunami berbasis masyarakat masih kurang, dapat dikatakan demikian karena selain kesadaran masyarakat yang masih rendah, BPBD juga belum memiliki dasar hukum atau regulasi khusus tentang penanggulangan bencana di kabupaten Maluku Tengah, selain itu juga belum ada rencana kontingensi terkait Tsunami di kabupaten Maluku Tengah.

Selain kesimpulan di atas penulis juga menyimpulkan beberapa poin yang diambil berdasarkan focus dari penelitian ini, yaitu:

1. Peranan BPBD Kabupaten Maluku Tengah Dalam Mitigasi Bencana

a. Peranan BPBD sebagai regulator

Peran BPBD Kabupaten Maluku Tengah sebagai regulator ini menjadi sangat penting dengan adanya RENSTRA tersebut, dikarenakan menjadi titik awal atau pedoman dalam pelaksanaan atau upaya mengurangi risiko bencana. Perumusan strategi kebijakan penanggulangan dilakukan dengan pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Harapannya dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, pelaksanaan atau implementasi program dan kegiatan akan dapat secara efektif dan efisien hingga pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

b. Peranan BPBD sebagai eksekutor

Peran BPBD sebagai eksekutor sangat penting melihat dari tanggungjawab yang dimiliki. BPBD sebagai aktor utama dalam upaya mitigasi bencana di kabupaten Maluku Tengah harus dapat berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis atau *stakeholder* lain yang terkait, agar dalam implementasi kebijakan program dan proyek dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Upaya BPBD Kabupaten Maluku Tengah Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Maluku Tengah Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat, antara lain:

- a. Pembangunan Kapasitas Dalam Rangka Peningkatan Sumberdaya Manusia BPBD.
- b. Sosialisasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.
- c. Upaya Pelembagaan Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai, yang terdiri dari:
 - 1) Pembentukan Tim Satuan Reaksi Cepat (SRC)
 - 2) Pembuatan Peta Dan Pemasangan Rambu-rambu Bencana Tsunami
- d. Pelibatan Aktor Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

3) Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Amahai.

a. Faktor Pendukung

1) Koordinasi Yang Baik Antara Anggota BPBD

Dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Maluku tengah. Sistem koordinasi yang baik ini juga dapat berjalan karena dibina dengan asas kekeluargaan yang kuat.

2) Keterlibatan *Stakeholder* Dalam Setiap Kegiatan Mitigasi Bencana

Keterlibatan aktor-aktor yang terkait sangat diperlukan dalam upaya mitigasi bencana Tsunami, mulai dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. BPBD kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki program-program penanggulangan bencana yang di dalamnya terdapat upaya-upaya mitigasi. Keikutsertaan aktor-aktor terkait dalam mitigasi bencana merupakan langkah tepat, mengingat BPBD masih memiliki beberapa kekurangan yang mampu di dilengkapi oleh aktor-aktor tersebut.

b. Faktor Penghambat

1) Belum Adanya regulasi lokal Tentang Penanggulangan Bencana

Keberadaan regulasi lokal atau Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana tentunya akan sangat diperlukan oleh BPBD sebagai payung hukum yang dapat mempermudah sekaligus memaksimalkan kinerja dari BPBD terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Maluku Tengah.

2) Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang

Masyarakat kurang begitu peduli terkait masalah kebencanaan dan BPBD selalu berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Pola pikir masyarakat masih menganggap bahwa

bencana merupakan sudah takdir dari Tuhan dan cenderung pasrah menghadapinya. Seharusnya masyarakat harus bisa lebih berfikir positif dan mengubah pandangannya terhadap terjadinya bencana merupakan kehendak tuhan. Untuk ini diperlukan upaya ekstra dari BPBD guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat menjadi sadar dan tau apa yang harus dilakukan sebagai upaya meminimalisir dampak dari bencana tersebut.

3) Ego sektoral yang Masih Tinggi

BPBD dan berbagai SKPD terkait harus bisa bekerja sama dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga segala bentuk upaya dalam rangka penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lebih baik. Fenomena ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi BPBD dan SKPD terkait untuk sama - sama menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam hal ini adalah upaya mitigasi bencana di Kabupaten Maluku Tengah.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Maluku Tengah.
2. Perlu disusunnya rencana Kontigensi Tsunami, mengingat Kabupaten Maluku Tengah merupakan daerah yang rawan bencana Tsunami.

3. Dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, salah satunya dengan membangun Pusat Pelatihan Kebencanaan di Kabupaten Maluku Tengah.
4. Kesadaran masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan lagi, salah satunya dengan melakukan sosialisasi secara intensif dengan melibatkan lebih banyak masyarakat.
5. Perlu adanya sinkronisasi program/kegiatan terpadu yang melibatkan berbagai SKPD di Kabupaten Maluku Tengah.